



DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN (BI RATE)

Sony Hendra Permana*)

Abstrak

Pasca-naiknya harga BBM bersubsidi, otoritas moneter juga mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dari sebesar 25 basis poin (bps) ke level 7,75 persen. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca-kenaikan harga BBM ini tetap terkendali. Namun demikian, kebijakan ini juga akan memberikan sejumlah dampak lain seperti kredit macet akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan potensi menurunnya penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan utang luar negeri. Selain itu, kenaikan BI Rate ini juga akan memukul industri akibat naiknya harga BBM bersubsidi, upah buruh, dan tarif listrik.

Pendahuluan

Berselang satu hari setelah diumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia (BI), juga mengumumkan kenaikan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 bps menjadi 7,75 persen. Suku bunga *lending facility* juga mengalami kenaikan sebesar 50 bps menjadi 8,00 persen, sementara suku bunga *deposit facility* tetap pada level 5,75 persen berlaku efektif sejak 19 November 2014. Dalam siaran pers-nya, BI menyatakan kenaikan BI rate ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu 4 ± 1 persen pada tahun

2015. Kenaikan *lending facility* yang lebih tinggi dari BI rate dan tidak dinaikannya *deposit facility* karena untuk menjaga agar perbankan lebih memilih untuk meminjam/ menempatkan eksekutif likuiditasnya melalui pasar uang antarbank.

Selain itu, kebijakan menaikkan BI rate adalah untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan tetap terkendali di sekitar 2,5 – 3 persen dari PDB dan tidak membesar, serta menjaga agar kepercayaan investor tetap kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Defisit neraca transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) yang terkendali sangatlah penting untuk memastikan perekonomian nasional dapat menciptakan pertumbuhan kuat dan berimbang, serta penciptaan lapangan kerja

*) Peneliti Muda Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, E-mail: sony.hendra@dpr.go.id / sony_hendra@yahoo.com.



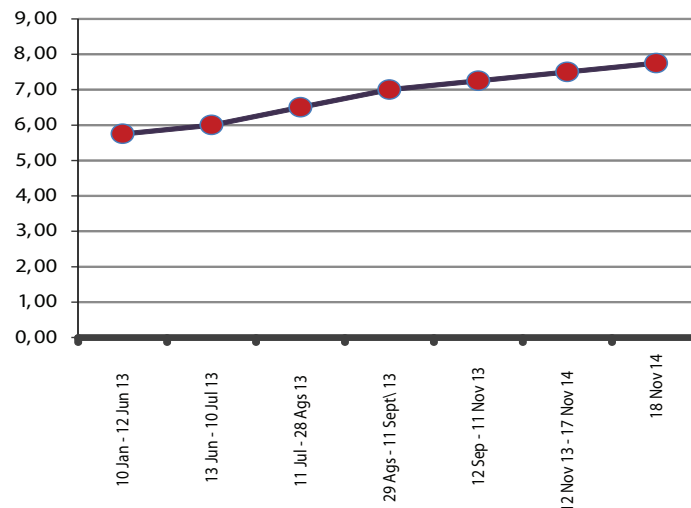
dapat terus berlanjut. Selain itu, kebijakan ini juga dibutuhkan untuk mempertahankan kepastian kepercayaan investor tentang keseluruhan konsistensi dan kualitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro Indonesia di tengah-tengah semakin dekatnya peningkatan suku bunga global. Kepercayaan investor ini penting, agar likuiditas global yang mengalir ke pasar saham dan obligasi, terutama obligasi negara, tetap tinggi. Dengan demikian, kondisi ini pada akhirnya akan mengurangi beban pembiayaan pembangunan melalui Surat Berharga Negara.

Dalam kurun waktu 2 tahun ini terjadi tren peningkatan BI rate yang cukup signifikan, dari 5,75 persen di awal tahun 2013 menjadi 7,75 persen di akhir tahun ini (**Gambar 1**). Hal ini terjadi karena adanya tekanan dari dalam negeri seperti kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL), dan tekanan dari luar negeri.

Dampaknya Terhadap Sektor Keuangan

Kenaikan BI rate juga akan sangat berpengaruh terhadap sektor keuangan, khususnya perbankan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, kenaikan BI rate (25 bps) di atas *steady state* akan menyebabkan kenaikan bunga pinjaman sebesar 20 bps di atas *steady state* dan secara bertahap kembali ke keadaan *steady state*. Namun demikian, beberapa kalangan perbankan menilai peningkatan BI rate kali ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap suku bunga kredit dan simpanan karena kedua suku bunga tersebut telah mengalami penyesuaian yang signifikan sepanjang tahun ini. Namun demikian, jika kita melihat pengalaman kenaikan BI rate di awal bulan November 2013, beberapa bank langsung merespon kenaikan BI rate terhadap suku bunga dasar kreditnya, khususnya pada kredit modal kerja (lihat **Gambar 2**).

Gambar 1. Pergerakan BI Rate Tahun 2013-2014



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Gambar 2. Suku Bunga Dasar Kredit Beberapa Bank Periode Oktober 2013 – Januari 2014

Nama Bank	Suku Bunga Dasar Kredit (%)							
	Kredit Modal Kerja				Kredit Konsumsi			
	Okt 13	Nov 13	Des 13	Jan 14	Okt 13	Nov 13	Des 13	Jan 14
BANK MANDIRI	14.92	14.92	14.92	14.92	11.63	11.62	11.63	11.63
BRI	13.67	13.83	13.83	13.83	11.13	11.13	11.13	11.25
BCA	10.50	10.88	11.00	11.00	9.34	9.34	9.34	10.11
DANAMON	14.23	14.23	14.50	14.51	12.23	12.25	12.25	12.25
CITIBANK	8.65	9.15	9.15	9.15	11.50	11.50	11.50	11.50
BPD JATIM	10.57	10.22	11.46	9.67	9.85	9.53	10.60	8.97

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu pada pasar saham, kenaikan BI *rate* ini dinilai akan menekan pasar saham secara jangka pendek. Margin laba emiten pada kuartal IV/2014 hingga kuartal I/2015 diperkirakan akan tertahan. Pendanaan emiten akan tertahan akibat biaya (*cost of fund*) penerbitan surat utang tinggi. Kenaikan BI *rate* ini juga dinilai tidak berdampak baik pada pasar saham karena investor cenderung beralih ke deposito perbankan dibandingkan saham yang berisiko. Namun demikian, dalam jangka panjang, peningkatan BI *rate* ini akan menstabilkan ekonomi. Meskipun akan memberikan sedikit tekanan pada margin laba emiten, namun perubahan BI *rate* tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan IHSG keseluruhan mengingat pada dasarnya investor akan termotivasi untuk membeli saham perusahaan yang memiliki kinerja baik dan memiliki prospek usaha yang baik.

Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia

Secara teoritis, bank sentral menggunakan instrumen suku bunga acuan untuk menstabilkan (menahan) laju inflasi. Kebijakan yang ditempuh otoritas moneter menaikkan suku bunga acuan secara tidak langsung akan mengurangi jumlah uang beredar di pasar melalui dua mekanisme. *Pertama*, pemberian insentif kepada masyarakat untuk menabung dan mengurangi permintaan masyarakat untuk mengambil kredit. *Kedua*, karena jumlah uang yang beredar berkurang, maka secara otomatis nilai uang akan bertambah sehingga nilai barang dan jasa relatif menurun. Pada akhirnya, harga barang dan jasa juga akan mengalami penurunan sehingga laju inflasi dapat ditahan. Namun demikian, dampak kenaikan BI *rate* terhadap inflasi tidak akan secara langsung terjadi, setidaknya-tidaknya tidak baru akan terasa dua bulan setelah kebijakan tersebut dilakukan.

Selain meredam laju inflasi, kenaikan BI *rate* ini juga diharapkan mampu menciptakan stabilitas nilai tukar dan neraca pembayaran yang sehat. Naiknya BI *rate* akan memicu naiknya suku bunga di dalam negeri yang diharapkan mampu menahan *capital outflow* dan menarik *capital inflow* yang pada akhirnya akan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Namun demikian, beberapa kalangan menilai kebijakan moneter kali ini dinilai terlalu ketat mengingat proyeksi pertumbuhan inflasi hanya sekitar 2 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada 2013 yang mencapai 8,28 persen pasca-kenaikan BBM pada bulan Juni 2013. Selain itu, kenaikan suku bunga acuan akan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang telah menunjukkan tren perlambatan. Pada kuartal III/2014 tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5,01 persen atau menurun dibandingkan kuartal I dan II yang masing-masing sebesar 5,21 persen dan 5,12 persen. Diperkirakan pertumbuhan akan tertekan sebesar 0,5 persen akibat kebijakan tersebut.

Dampak lain yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan ini adalah kekhawatiran terhadap terdorongnya kecenderungan para pengusaha untuk memilih pinjaman dari luar negeri dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Hal ini akan mengakibatkan utang luar negeri akan semakin membesar. Berdasarkan data BI, posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir September 2014 tercatat sebesar USD 292,3 miliar, meningkat USD 6,1 miliar atau 2,1 persen dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II/2014 senilai USD 286,2 miliar.

Selain itu, naiknya BI *rate* dinilai akan melemahkan industri di dalam negeri. Kebijakan ini akan menambah beban lebih berat, khususnya bagi industri padat karya, karena saat ini pelaku usaha sedang mengalami tekanan yang sangat besar setelah kenaikan harga BBM naik, upah buruh, dan tarif listrik. Kenaikan BI *rate* akan berpotensi menimbulkan kredit macet, terutama di sektor kecil karena kenaikan BI *rate* ini akan berpengaruh pada meningkatnya suku bunga bank pada umumnya.

Tekanan yang dialami oleh industri yang bertubi-tubi ini dikhawatirkan akan menyebabkan sejumlah usaha pada beberapa sektor usaha mengalami kepailitan. Meskipun *shock* yang disebabkan oleh kenaikan BI *rate* ini hanya dalam jangka pendek, namun beberapa usaha yang tidak memiliki ketahanan terhadap tekanan eksternal, khususnya UMKM, akan mendapat kesulitan dari kebijakan ini. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan

angkatan kerja yang tinggi tidak dapat diserap sepenuhnya oleh dunia usaha akibat dari berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satu sektor yang akan terkena dampak secara langsung akibat naiknya BI *rate* ini adalah sektor otomotif. Kenaikan BI *rate* ini dikhawatirkan akan mempengaruhi acuan kredit kepemilikan mobil ke pelanggan. Selain itu juga akan mempengaruhi suku bunga kredit untuk pendanaan perbankan ke sektor otomotif. Sektor properti juga merupakan sektor yang menghadapi tekanan berat terhadap kenaikan BI *rate*. Diperkirakan setiap kenaikan satu persen suku bunga akan menurunkan daya beli masyarakat sebesar 4-5 persen terhadap sektor properti.

Untuk itu, agar pelaku usaha tidak terlalu lama menanggung beban akibat melonjaknya ongkos produksi karena kenaikan BI *rate*, BBM bersubsidi, dan tarif dasar listrik, pemerintah perlu melakukan akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur agar alur distribusi barang dan jasa dapat lebih lancar, sehingga dapat mengurangi biaya bagi pelaku usaha. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penutup

Kenaikan harga BBM bersubsidi pertengahan bulan ini segera direspons oleh otoritas moneter dengan menaikkan BI *rate* sebesar 25 bps menjadi 7,75 persen. Kenaikan ini ditempuh dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu 4 ± 1 persen pada tahun 2015. Kenaikan BI *rate* juga bertujuan untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan tetap terkendali di sekitar 2,5 – 3 persen dari PDB. Terhitung sejak awal tahun 2013 sampai saat ini, otoritas moneter telah menaikkan BI *rate* sebesar 2 persen.

Kenaikan BI *rate* ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan suku bunga kredit perbankan. Sementara itu di pasar saham, secara jangka pendek margin laba emiten akan tertahan akibat biaya penerbitan surat utang tinggi. Namun, kenaikan BI *rate* ini juga memberikan tekanan bagi perekonomian yang akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga dikhawatirkan akan meningkatkan hutang

luar negeri sebagai akibat beralihnya para pengusaha dalam mengakses pembiayaan ke luar negeri karena tingkat suku bunga di luar negeri lebih rendah. Bagi industri, kenaikan BI *rate* ini akan semakin memberikan pukulan pasca mendapatkan tekanan yang sangat besar setelah harga BBM naik, upah buruh naik, dan kenaikan tarif listrik.

DPR RI perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja pemerintah khususnya dalam pengelolaan anggaran negara. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur agar menjadi insentif bagi pengusaha dalam melakukan kegiatan usahanya pascakenaikan tersebut. Momentum ini perlu diupayakan sehingga kegiatan ekonomi dapat bertumbuh dengan baik yang pada akhirnya berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Referensi

- "Bank Indonesia, Bauran Kebijakan Bank Indonesia Merespon Kebijakan Reformasi Subsidi BBM Pemerintah", 18 November 2014, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_169214.aspx, diakses tanggal 20 November 2014
- "BI Rate Lemahkan Industri", *Kompas*, 20 November 2014
- "BI Rate Naik, Kadin Indonesia: waktunya Salah", 20 November 2014, <http://finansial.bisnis.com/read/20141120/9/274205/bi-rate-naik-kadin-indonesia-waktunya-salah>, diakses tanggal 20 November 2014
- "Bankir: Tidak Pengaruhi Suku Bunga Bank. Kendalikan Inflasi, BI Rate Naik ke 7,75 persen", *Suara Pembaruan*, 19 November 2014
- Umar Juoro, "Model Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian Terbuka Untuk Indonesia", *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan* Volume 16 Nomor 1 Juli 2013, Jakarta: Bank Indonesia, 2013.
- "Kenaikan BI Rate: Bank Indonesia Overdosis", *Bisnis Indonesia*, 19 November 2014.
- "Dampak BI rate | BEI Yakin Likuiditas Saham Tidak Akan Berkurang. Laba Emiten Akan Tergerus", *Koran Jakarta*, 20 November 2014.
- "Kebijakan BBM dan Kenaikan BI Rate Akan Redam Pertumbuhan Ekonomi", 19 November 2014, <http://katadata.co.id/berita/2014/11/19/kebijakan-bbm-dan-kenaikan-bi-rate-akan-redam-pertumbuhan-ekonomi#sthash.aU2g2p7n.dpuf>, diakses tanggal 20 November 2014.